

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTRENAL (SPMI) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 BATANG HARI

Amrizal¹, Sukatin², Nurmalasari³, Nur Adilla⁴, M Riski Destrian Ramadhan⁵,
Sudirman⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAI Nusantara Batang Hari, Indonesia

* Corresponding Email: Yazamrizal36@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan yang bermutu adalah yang dapat mencapai atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lembaga pendidikan perlu memiliki mutu yang baik, dan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, maka lembaga pendidikan harus menetapkan strategi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu secara Internal. Pendidikan mutu adalah proses konsisten dan berkelanjutan dalam menetapkan serta memenuhi standar pengelolaan.

Kata Kunci: Pendidikan Bermutu, Penjaminan Mutu Internal

ABSTRACT

Quality education is one that can achieve or even exceed the National Standard of Education (SNP). Educational institutions need to have good quality, and to obtain education, educational institutions must implement a strategy for implementing a quality assurance system internally. Quality education is a consistent and continuous process in setting and meeting management standards.

Keywords: *Hight Quality Education, Internal Quality Assurance*

PENDAHULUAN

Sistem penjaminan mutu di Indonesia salah satunya diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud, 2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kesatuan organisasi, kebijakan dan proses yang mencakup seluruh kegiatan yang saling berinteraksi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kami bekerja satu sama lain secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Sistem penjaminan mutu internal yaitu suatu mekanisme penjaminan mutu diimplementasikan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut, yang membawa semua komponen yang ada di lembaga tersebut. Saat ini, kualitas pendidikan menengah di Indonesia masih tidak mencapai harapan yang diinginkan. Pemetaan mutu pendidikan nasional memperlihatkan bahwa berkisarkan 16%, lembaga pendidikan berhasil melengkapi Standar Nasional Pendidikan (SNP), sementara sebagian besar lembaga

pendidikan lainnya masih belum memenuhi standar tersebut. Bahkan, beberapa di antaranya belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Banyak tim pengelola pendidikan yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya standar mutu pendidikan. Selain itu, sebagian besar lembaga pendidikan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan memenuhi standar mutu. Penting bagi sektor pendidikan untuk melaksanakan penjaminan mutu di bidang pendidikan secara efektif, mandiri dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemerintah Indonesia, sistem pendidikan nasional diartikan sebagai seluruh unsur pendidikan yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya, masing-masing satuan pendidikan wajib menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan, ditujukan agar mencapai/melampaui SNP. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan menengah merupakan satu kesatuan yang terdiri atas kebijakan dan proses terkait penyelenggaraan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Partisipan dalam penelitian ini mencakup kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Batang Hari. Adapun teknik analisis data yang diterapkan melibatkan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SPMI Dikdasmen merupakan unsur terpadu yang memuat kebijakan dan proses untuk menjamin mutu pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Penekanannya adalah pada pencapaian pendidikan bermutu sesuai dengan standar pendidikan nasional. SPMI Dikdasma dilaksanakan pada setiap satuan pengajaran dan mencakup seluruh komponen satuan tersebut. Seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan masuk dalam ruang lingkup Dikdasme SPMI. Hal ini melibatkan penggunaan beraneka ragam sumber daya guna mencapai standar nasional pendidikan yang mana dinyatakan melalui satuan pendidikan. Hal ini dijelaskan pada panduan pengelolaan satuan pendidikan.

Untuk Dikdasmen SPMI dapat berfungsi secara optimal pada suatu satuan pendidikan, diperlukan unsur penjaminan mutu berupa tim penjaminan mutu sekolah yang independen terhadap administrasi sekolah. Tim ini sekurang-kurangnya terdiri dari unsur administrasi, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Pelaksanaan SPMI pada pendidikan dasar terdiri dari lima tahap siklus. Tahap pertama adalah pemetaan mutu yang dilakukan melalui Kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) berdasarkan standar nasional pendidikan. Pada tahap kedua, disusun rencana peningkatan mutu yang meliputi penyusunan rancangan peningkatan sekolah, rencana aksi berdasarkan peta mutu, kebijakan pemerintah (Kurikulum dan SNP) dan rancangan penting pengembangan sekolah.

Langkah ketiga adalah dilaksanakannya rancangan pengembangan kualitas yang memenuhi mutu pendidikan yang mencakup pencapaian standar nasional pendidikan pada pengelolaan pengajaran, serta metode pembelajaran. Langkah keempat adalah pengontrol serta penilaian. Hal ini dilaksanakan agar dapat membenarkan pelaksanaan peningkatan mutu, konsisten dengan rancangan yang disusun serta dituangkan pada informasi Pelaksanaan Kepatuhan Sistem Nasional Pendidikan. Pelaksanaan rancangan peningkatan kualitas dilakukan lembaga satuan. Pemantauan serta penilaian juga memberikan anjuran kegiatan pembaruan untuk memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Kelima, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, kami mengembangkan strategi peningkatan kualitas berdasarkan kinerja masa lalu, menetapkan standar kualitas baru yang lebih tinggi, dan membangun budaya.

1. Pemetaan Mutu

Dalam pemetaan mutu, mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP dicatat melalui kegiatan self-assessment sehingga dibuat peta mutu (standar pelayanan) yang menjadi akar permasalahan dan rekomendasi permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan tugas dan kewajiban penjaminan mutu, sekolah secara teknis dapat melaksanakan tahapan siklus sebagai berikut: (a) Pemetaan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan SNP; (b) menyusun rencana kerja untuk meningkatkan mutu sekolah; (c) pelaksanaan pengendalian mutu dan proses pembelajaran; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi; (e) Hasil pemantauan dan evaluasi harus digunakan untuk menentukan strategi peningkatan mutu.

Seluruh unsur satuan pendidikan harus terlibat dalam pelaksanaannya. Pemetaan mutu dilakukan melalui kegiatan self-assessment (EDS) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Implementasi EDS berlangsung dalam fase-fase berikut: (1) Pembuatan peralatan. (2) Kumpulkan data. (3) Pengolahan dan analisis data. (4) Membuat peta yang berkualitas. Hasil pemetaan kualitas adalah sebagai berikut: (a) Peta pencapaian standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan yang mendasarinya. b) Tantangan yang muncul. (c) Pengusulan untuk perbaikan.

Dengan kata lain pemetaan mutu adalah proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data/informasi Proses pengumpulan, analisis, dan pengolahan data/informasi dikenal dengan istilah pemetaan kualitas yang mendorong Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan selanjutnya membuat anjuran seperti rencana dan proses menuju pencapaian yang bermutu. Metrik ketercapaian SPMI dapat diperoleh melalui metrik proses, keluaran, hasil, serta akibatnya. Kebijakan pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin pemerataan antara sekolah negeri dan swasta, sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), dan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).

Satori menjelaskan bahwa pemetaan mutu merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memahami kondisi serta keadaan dengan mencerminkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kegiatan ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu oleh berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan pemerintah. Mutu pendidikan di Indonesia dinilai

berlandaskan kompetensi satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu, pemetaan mutu pendidikan dapat diartikan sebagai langkah untuk memahami kondisi dan keadaan yang menjadi ciri kapasitas satuan pendidikan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) di jangka yang ditentukan pada pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pasal 5 Ayat 1 mengatur bahwa pemetaan mutu merupakan SPMI siklus I.

Peta mutu merupakan gambaran grafis dengan menguraikan biografi kualitas satuan pendidikan di suatu tempat dan mencerminkan mutu berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan. Lebih spesifiknya dibuat melalui serangkaian tingkat pemetaan yang dimulai dari tingkat satuan pendidikan. Hasil diperoleh dalam bentuk profil kualitas, yang dikumpulkan ke tingkat berikut dalam batas wilayah tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa analisis penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) di SMA Negeri 6 Batang Hari dalam rangka pemetaan mutu dapat mencakup beberapa faktor. Hal ini mencakup evaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar kualitas, efektivitas SPMI dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidaksesuaian, dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas.

SMA Negeri 6 Berdasarkan temuan di Batang Hari, tahap pemetaan penjaminan mutu internal dilakukan sesuai dengan indikator tahap pemetaan mutu. Hal ini diketahui melalui observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di sekolah tersebut. Dengan kata lain sekolah dijalankan sesuai prosedur administrasi.

2. Perencanaan Mutu

Combs mengatakan rencana tersebut menyangkut penerapan analisis proses pengembangan pendidikan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bawahan dan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Di sisi lain, Hantoko mengatakan perencanaan merupakan inti dari manajemen karena mengurangi ketidakpastian di masa depan dan memungkinkan pengambil keputusan menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif.

Cunningham lebih lanjut berpendapat bahwa perencanaan melibatkan pengetahuan, fakta, imajinasi, yang menyatakan bahwa perencanaan melibatkan pemilihan dan penggabungan asumsi. Senada dengan hal tersebut, Soetopo & Soemanto menyatakan bahwa dalam bidang manajemen terdapat berbagai langkah atau kegiatan perencanaan seperti: (a) melihat ke depan dan memperkirakan situasi dan kebutuhan di masa depan; (b) menentukan tujuan; (c) menentukan kebijakan yang harus diadopsi sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan; (d) mengembangkan program, termasuk pendekatan yang akan diadopsi, sifat dan urutan kegiatan; e) menentukan biaya; dan (f) menentukan jadwal dan prosedur yang akan dilakukan.

Berdasarkan temuan penelitian, hal ini dapat digambarkan sebagai analisis implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) di SMA 6 Batanghari dalam konteks perencanaan mutu melibatkan sejauh mana perencanaan mutu telah terintegrasi dengan kebijakan. Terkait kesesuaian dengan standar mutu, efektivitas perencanaan, dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan mutu.

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama penelitian dapat disimpulkan bahwa rencana SPMI di SMA Negeri 6 Batang Hari meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi program SPMI dan siklus internal sekolah kepada seluruh anggota.
2. Membentuk tim penjaminan mutu pendidikan sekolah.
3. Kami melakukan pemetaan mutu berdasarkan hasil penilaian mandiri sekolah (EDS) dan laporan mutu, serta membuat peta permasalahan dari hasil pemetaan mutu.

3. Pelaksanaan

Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan didasarkan pada standar sesuai ketentuan yang berlaku. Landasan utama penjaminan mutu pendidikan di tingkat dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang disahkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah di bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan serta pengelola dan penyelenggara pendidikan.

Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan yang mencakup seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*), yang mana seluruh komponen satuan pendidikan secara bersama-sama membentuk budaya mutu yang dimiliki.

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama penelitian, penerapan SPMI di SMA Negeri 6 Batang Hari didasarkan pada delapan standar penjaminan mutu dengan mempertimbangkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sapras, dan standar pembiayaan. Kedelapan kriteria ini sangat penting di SMA Negeri 6 Batang Hari. Penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan delapan standar nasional pendidikan di SMA Negeri 6 Batanghari dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

4. Evaluasi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan maka diperlukan evaluasi pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 menyebutkan:

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai unsur pendidikan pada setiap kurikulum, jenjang, dan jenis pendidikan, serta merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Yang dimaksud dengan "Evaluasi Standar SPMI" adalah kegiatan penilaian kepatuhan terhadap Standar SPMI dengan cara mengamati proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada seluruh unit kerja untuk mengetahui terlaksananya proses atau kegiatan tersebut. Manajemen pengendalian mutu antara lain. Satuan kerja dilaksanakan sesuai standar SPMI.

Evaluasi ini diperlukan untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan untuk mengevaluasi pencapaian standar

nasional pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 mengatur bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan harus dilakukan secara mandiri, teratur, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi akan dilakukan untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Dalam kerangka SPMI, evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (MONEV). Secara khusus fase ini terdiri dari bagaimana satuan pendidikan mengukur, menghitung, dan menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Tahap ini tidak dilakukan di akhir, melainkan dengan memindai proses pemutakhiran kualitas dari awal, pertengahan, dan terakhir hingga data diterima, bukan sekadar menghitung hasil pemutakhiran kualitas. Data yang diperoleh tidak hanya diolah dan diselesaikan.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara Evaluasi terkait penjaminan mutu yang dilakukan SMA Negeri 6 Batanghari berbanding lurus dengan pedoman mutu dan dilakukan sesuai dengan SPMI Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Penetapan Standar Baru

Menetapkan standar dan mengembangkan strategi mutu baru merupakan langkah yang perlu diambil oleh sekolah dan lembaga pendidikan dalam situasi di mana strategi mereka sebelumnya gagal pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah yang memenuhi SNP dapat menetapkan standar kualitas yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan.

Penetapan standar dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah suatu proses yang melibatkan penetapan kriteria atau parameter yang harus dipenuhi untuk memastikan kualitas suatu produk atau layanan. Standar tersebut menjadi pedoman bagi organisasi untuk mengukur, memantau, dan terus meningkatkan mutu secara konsisten. Dalam SPMI, penetapan standar melibatkan pembuatan panduan, prosedur, atau kriteria yang menjadi patokan untuk memastikan pencapaian kualitas yang diinginkan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadikan sekolah sebagai pelaku utama atau ujung tombak penjaminan mutu dalam bidang pendidikan. SPMI menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran dan menekankan pentingnya budaya mutu. Kualitas bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah kebutuhan, bahkan gaya hidup. Mutu pendidikan bukan lagi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, namun menjadi perhatian semua orang. Seluruh warga sekolah diharapkan berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah.

Penerapan penjaminan mutu yang benar akan meningkatkan mutu pembelajaran di lembaga pendidikan. Indikator peningkatan mutu yang terutama ialah kemajuan proses belajar-mengajar dan outcome menggali ilmu maupun capaian akademis siswa. Proses pembelajaran yang memenuhi standar ditandai dengan keterlibatan (aktivitas) siswa dalam pembelajaran dan terciptanya rasa belajar yang menyenangkan. Jika peningkatan

kualitas yang diharapkan tidak tercapai, kepala sekolah dan tim mutu sekolah harus melakukan refleksi serta mengenali alasan terjadinya situasi itu. Penganalisaan kualitatif sepatutnya melakukan makin terperinci demi mengoptimalkan rencana dan tindakan di periode akademik selanjutnya.

Menurut pandangan para ahli, penetapan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dianggap sebagai langkah krusial dalam memastikan konsistensi dan keunggulan dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Para ahli mutu secara umum menyoroti pentingnya adanya standar yang jelas dan terukur sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Standar ini berperan sebagai panduan bagi organisasi untuk mencapai tujuan mutu dengan menyediakan kerangka kerja yang dapat diukur dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi. Keberhasilan SPMI seringkali tergantung pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan dan meningkatkan standar mereka sejalan dengan perubahan kebutuhan dan tren industri.

Penjelasan di atas disusun berdasarkan pemahaman umum mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan penetapan standar dalam konteks manajemen mutu. Ini bukan citraan langsung dari pendapat atau pandangan spesifik satu ahli tertentu, melainkan merupakan ringkasan umum yang mencakup konsep-konsep umum yang sering diakui dalam domain manajemen mutu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Pelaksana Penjaminan SPMI SMA Negeri 6 Batang Hari menyatakan: "Penetapan standar mutu SMA 6 Batang Hari berdasarkan oleh tujuan dan capaian sekolah, dan menyesuaikan terhadap kemampuan sekolah." Standar mutu SMA Negeri 6 Batang Hari bisa berubah seiring berjalannya waktu dan memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Nanang (2012) dalam bukunya, dimana beliau menyatakan bahwa orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di dunia usaha dan dunia industri seringkali mempunyai pemahaman yang berbeda tentang pendidikan, sehingga seharusnya sekolah menyikapi segala alih tersebut, menciptakan standar mutu sebagai patokan untuk mencapai sekolah berkualitas tinggi.

Segala tahapan penjaminan mutu di SMA Negeri 6 Batang Hari menghasilkan pencatatan kinerja Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baik.

SIMPULAN

1. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) di SMAN 6 Batang Hari dalam konteks penelitian kualitatif dapat melibatkan beberapa faktor. Hal ini mencakup penilaian sejauh mana kepatuhan terhadap standar kualitas, efektivitas SPMI dalam mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan, dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas.
2. Pemetaan mutu SMA Negeri 6 Batang Hari diselesaikan sesuai dengan indikator tahapan pemetaan mutu. Dengan kata lain, secara administratif sekolah ini beroperasi sesuai aturan. Perencanaan mutu SMAN 6 Batang Hari terintegrasi dengan kebijakan.

Terkait dengan kepatuhan terhadap standar mutu, kinerja proyek dan dampaknya terhadap pencapaian sasaran mutu.

3. Perencanaan SPMI di SMA Negeri 6 Batang Hari meliputi sosialisasi program SPMI kepada seluruh warga dan internal sekolah, pembentukan tim penjaminan mutu pembelajaran sekolah, pembuatan pemetaan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah (EDS) dan mutu. rapor, kemudian membuat peta masalah dari hasil pemetaan kualitatif. SMA Negeri 6 Batang Hari tentunya menerapkan penjaminan mutu berdasarkan delapan standar, dengan memperhatikan standar isi, standar proses, standar kualifikasi kelulusan (SKL), sarana prasarana dan pendanaan. Kedelapan standar ini menjadi perhatian khusus di SMA Negeri 6 Batang Hari.
4. Evaluasi Penjaminan Mutu yang dilakukan di SMA Negeri 6 Batang Hari telah selesai dan berkaitan langsung dengan pedoman mutu dan sesuai dengan SPMI Badan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Penetapan standar mutu di SMA 6 Batang Hari berdasarkan pada tujuan dan pencapaian sekolah juga menyesuaikan kemampuan sekolah. Mutu SMA Negeri 6 Batang Hari bisa berubah seiring berjalannya waktu, sesuai persyaratan mutu yang menjadi harapan oleh para pemangku kepentingan. Seluruh langkah penjaminan mutu membuahkan hasil yang baik dalam catatan atau rapor Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMA Negeri 6 Batang Hari

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Ahmad Nurmandi dkk. Pedoman SPMI PTMA. Yogyakarta: Majelis Diklitbank PP Muhammadiyah, 2019.
- Dani Hidayatulloh. Model SPMI Berbasis Employability Skills. Bandung: Indonesia Emas Group Anggota IKAPI, 2022.
- Hamzah B Uno. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Herman Novia Rozi dkk. Manajemen Strategi Dan Mutu Pendidikan Islam. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Ketut Surnaya dan Wayan Murnasa, Peta Mutu Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Bangli. Bali: LPMP Bali, 2018.
- Sabar Budi Raharjo. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
- Syafrudin Januar. Mutu Pendidikan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Binaan. Kalimantan Timur: Gunawana Lestari, 2022.
- Syafrudin Januar. Pemetaan Mutu Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparatif: Status dan Jenjang Pendidikan). Samarinda: Gunawa Lestari, 2021.
- Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun. Perencanaan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Indra Pamala dkk. Manajemen Sekolah Model Pada Jenjang Pendidikan Dasar. Equity In Education Jurnal (EEI). 2021.

Nyoman Sridana. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA. 2018.

Sodiq R dan Haryana. Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Magelang.
Jurnal: E-Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif-S1. 2017.